

ISSN: 1412-3460

**m** *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA  
PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG**

Masnun Tahir

**PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA**

Basrowi

**WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU**

Ayu Usada Rengkaningtias

**GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN  
(Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)**

Asnath Niwa Natar

**KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID**

Muhamad Isna Wahyudi

Volume 17, No.1, Januari 2018

**Terakreditasi Musawa sebagai Jurnal  
Nomor: 2/E/KPT/2015**

Vol. 17, No. 1, Januari 2018

 *Musāwa*  
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





**Managing Editor:**  
Witriani

**Editor in Chief:**  
Marhumah

**Editorial Board:**  
Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga)  
Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)  
Masnun Tahir (UIN Mataram)  
Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

**Editors:**  
Muhammad Alfatih Suryadilaga  
Alimatul Qibtiyah  
Fatma Amilia  
Zusiana Elly Triantini  
Muh. Isnanto

**TERAKREDITASI:**  
Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

**Alamat Penerbit/ Redaksi:** Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779  
Email: [pswsuka@yahoo.co.id](mailto:pswsuka@yahoo.co.id)  
Website: [psw.uin-suka.ac.id](http://psw.uin-suka.ac.id)

**Musāwa Jurnal Studi dan Islam** diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

**Redaksi** menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.



## Daftar Isi

<b>EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG</b> <i>Masnun Tahir</i> .....	1
<b>PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA</b> <i>Basrowi</i> .....	19
<b>WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU</b> <i>Ayu Usada Rengkaningtias</i> .....	32
<b>GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN (Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)</b> <i>Asnath Niwa Natar</i> .....	51
<b>KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID</b> <i>Muhamad Isna Wahyudi</i> .....	62
<b>PERAN LAKI-LAKI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> <i>Pajar Hatma Indra Jaya</i> .....	70
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTIKORUPSI (SPAK) DI YOGYAKARTA</b> <i>Muryanti; Tri Muryani; Anggi Candra Lestari</i> .....	86
<b>STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA</b> .....	95
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	97



# PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTIKORUPSI (SPAK) DI YOGYAKARTA

Muryanti; Tri Muryani; Anggi Candra Lestari

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
newsyant@yahoo.com*

## **Abstrak**

*Gerakan Saya Perempuan Anti korupsi (SPAK) Yogyakarta merupakan salah satu bagian dari aktivitas kegiatan pencegahan antikorupsi yang dicanangkan oleh KPK. Pada awalnya sasaran dari aktivitas di Yogyakarta adalah masyarakat umum, kemudian dipersempit untuk perempuan penegak hukum dan disabilitas. Perempuan memiliki peran yang penting dalam kegiatan pencegahan antikorupsi karena tanggungjawabnya dalam pengaturan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penggalan data melalui observasi dan wawancara dengan anggota SPAK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aktivitas SPAK Yogyakarta merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mencakup 4 aspek, yaitu: kuasa, partisipasi, kesadaran, akses dan kesejahteraan. Pemberdayaan SPAK Yogyakarta tersebut merupakan sebuah proses panjang mengingat kegiatan yang dilakukannya sebatas training dan sosialisasi sebagai bagian dari pendidikan anti korupsi, yang untuk mencaapai perubahan sistem sosial anti korupsi harus dibutuhkan waktu dan energi yang cukup untuk proses training dan sosialisasi. Namun, kegiatan yang dilakukan sudah mampu memberikan kesadaran kepada aktor untuk melakukan tindakan pencegahan pada level diri, keluarga dan masyarakat untuk memiliki kuasa, akses, partisipasi dan kesejahteraan dalam tindakan pencegahan anti korupsi. Hal ini menjadi motivasi bagi SPAK Yogyakarta untuk menjalankan kegiatannya secara terus menerus menuju negara dan masyarakat anti korupsi.*

**Kata kunci:** SPAK Yogyakarta, Antikorupsi, Gerakan dan Perempuan

## **Abstract**

*The movement of "I am Anti-corruption woman" (SPAK) Yogyakarta is one part of anti-corruption prevention activities proclaimed by the Corruption Eradication Commission (KPK).*

*At first, the targets of activity in Yogyakarta were the general public, then narrowed down for women in law enforcement and women with disability. Women play an important role in anti-corruption prevention activities because they are responsible to manage the household's economy. This research uses the qualitative method to collect the data through observation and interview. The result of this research shows that SPAK Yogyakarta activity is part of community empowerment covering four aspects, namely: power, participation, awareness, access, and prosperity. The empowerment of SPAK Yogyakarta is a long process due to the activities which are limited in training and socialization as part of anti-corruption education, whereas to achieve the change of anti-corruption social system, it requires sufficient time and energy to organize the training and socialization process. However, the activities undertaken are able to provide awareness for the*



*actors to take preventive action at the personal, family, and community level to have the power, access, participation, and prosperity in anti-corruption prevention measures. It becomes the motivation for SPAK Yogyakarta to run its activities continuously towards an anti-corruption state and society.*

**Keywords :** *SPAK Yogyakarta, Anti-Corruption, Movement and Women*

## **Pendahuluan**

Siapakah pelaku tindak pidana korupsi? Mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Sebagaimana data yang dirilis oleh KPK yang menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi selama tahun 2012-2013 adalah laki-laki (93,4 persen) dan sisanya perempuan. Beberapa terdakwa perempuan yang disidangkan Pengadilan di Jakarta, diantaranya Politisi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti dan staffnya Julia Prasetyarini dan Dessy Ariyati Edwin serta mantan politisi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo.<sup>1</sup> Walaupun jumlah pelaku tindak pidana korupsi mayoritas laki-laki, tidak berarti perempuan tidak terlibat dalam aktivitas di dalamnya.

Perempuan memiliki peran penting dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh laki-laki. Hal ini terkait dengan perannya dalam manajemen atau kendali keuangan ekonomi keluarga. Pudjiwati Sajogyo menyatakan peran perempuan tersebut berkaitan dengan pengaturan jumlah pemasukan dan mengatur jumlah pengeluaran, sehingga tidak terjadi jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Dengan kata lain, besar pasak daripada tiang.

Kendali perempuan atas keuangan keluarga menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang tidak kecil dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dalam konteks laki-laki sebagai seorang pejabat yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam birokrasi atau kekuasaan

an pemerintahan. Apabila perempuan tersebut mampu mengatur keuangan dengan baik, bahwa jumlah pemasukan seimbang atau lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran, maka pejabat tersebut akan terhindar dari perilaku koruptif. Sebaliknya, perempuan yang kurang mampu mengatur keuangan keluarga (jumlah pengeluaran lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan), akan mendorong laki-laki dalam konteks pencari nafkah keluarga melakukan tindakan korupsi.

Perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan tindakan korupsi, terkait dengan manajemen keuangan keluarga ini, menunjukkan bahwa proses pemberdayaan terhadap perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Pemberdayaan yang dimaksud dengan menggunakan perspektif *people centered development*, sebuah perspektif yang berbeda dengan perspektif pembangunan yang lebih bersifat sentralistik dan bersifat global<sup>2</sup>. Dengan bahasa yang lain, pemberdayaan merupakan mekanisme yang digunakan oleh manusia, organisasi dan masyarakat untuk memperoleh kuasa terhadap kehidupannya sendiri<sup>3</sup>. Lima unsur pemberdayaan tersebut mencakup : (1) kuasa, (2) partisipasi, (3) akses (sumberdaya), (4) kesadaran kritis dan (5) kesejahteraan<sup>4</sup>. Dalam konteks tindakan korupsi ini, tujuan pember-

<sup>1</sup> Stefanus Osa, "Perempuan dalam Pusaran Korupsi," *Kompas.com*, 27 Februari 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/29/15524491/perempuan.dalam.pusaran.korupsi.?page=1>

<sup>2</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>3</sup> Julian Rappaport, Carolyn Swift, and Robert Hess, eds., *Studies in empowerment : steps toward understanding and action* (New York : Haworth Press, 1984).

<sup>4</sup> Muryanti, *Perempuan Pedesaan (Kajian Sosiologis Pekerja Rumah Tangga/ PRT)* (Yogyakarta: Bima Sakti Publishing, 2012), 150.

dayaan perempuan adalah perempuan memiliki kuasa, partisipasi, akses, kesadaran kritis dan kesejahteraan sehingga dirinya dan keluarga terhindar dalam tindakan koruptif.

Perempuan dapat melakukan berbagai macam aktivitas sebagai salah satu bentuk kegiatan anti korupsi. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, diantaranya: meninjau organisasi-organisasi yang bersifat maskulin, adanya *affirmative action* untuk kegiatan perempuan dan mengembangkan pemikiran sejak dini bahwa adil harus dimulai sejak dalam pikiran sebagai titik awal adanya kesetaraan gender<sup>5</sup>. Selain itu menurut Nanik (2016) bahwa partisipasi perempuan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan di ruang domestik atau pun publik. Dalam ranah domestik atau keluarga, perempuan merupakan aktor yang mempengaruhi suami dalam melakukan tindak korupsi dan perempuan sangat berperan besar dalam pendidikan anti korupsi kepada anak-anak dan suami dalam keluarga. Perannya dalam ranah publik bisa dilakukan dengan berperan aktif dalam setiap kegiatan anti korupsi.

Basaria menyatakan hasil kajian yang dilakukan oleh KPK menunjukkan 80-85 persen pendidikan yang diperoleh anak berasal dari ibu. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam bentuk gerakan atau organisasi menjadi sangat penting dilakukan. Salah satu gerakan tersebut adalah gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Harapannya keberhasilan gerakan tersebut dapat mengurangi 98 persen tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga, program ini menjadi perhatian khusus. Pada prinsipnya, pada saat perempuan bergerak bersama dengan pola pikir yang sama akan berubah menjadi gerakan yang luar biasa.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Muhandis Azzuhri, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi," *Muwazah Jurnal Kajian Gender* Vol. 3 No. 2 (2013).

<sup>6</sup> Basaria Panjaitan, "KPK: Hanya 4% Ibu yang Ajarkan Kejujuran pada Anaknya," *Okenews*, 26 Oktober 2017, <https://>

Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) merupakan organisasi perempuan yang dibentuk oleh KPK. Pembentukan organisasi ini didasari oleh keprihatinan yang mendalam tentang tindakan korupsi yang membudaya dalam kehidupan sehari-hari, yang melekat dengan aktivitas perempuan. Tentunya hal ini tidak bisa dipisahkan bahwa perempuan dalam system patriarkhi sangat dominan terhadap semua pekerjaan di sektor domestik. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang akan banyak merugikan perempuan, sehingga perempuan harus bertindak melakukan pencegahan terhadap perilaku korupsi. Beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk mencegah tindakan korupsi adalah: Pendidikan anti korupsi dalam keluarga, aktif dalam kegiatan local/regional/nasional dalam pencegahan korupsi dan berperan aktif dalam kegiatan pemberantasan anti korupsi.

Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan dalam melakukan tindakan anti korupsi, seperti kegiatan yang dilakukan oleh SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) sebagai organisasi yang dibentuk oleh KPK. Tujuan dari organisasi ini adalah bagaimana perempuan berdaya dalam kasus korupsi. Dalam arti, mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi secara langsung atau pun secara tidak langsung dilakukan oleh suami atau keluarga besarnya. Partisipasi perempuan dalam SPAK tersebut menurut Feni Qoriroh<sup>7</sup> yang mengkaji aktivitas SPAK di Surabaya dapat dikategorikan menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu partisipasi pasif (ikut serta sebagai anggota SPAK, pengetahuan moral tentang korupsi dan perasaan moral dalam kegiatan anti korupsi) dan partisipasi aktif (ter-

[news.okezone.com/read/2018/03/19/337/1874852/kpk-hanya-4-ibu-yang-ajarkan-kejujuran-pada-anaknya](https://news.okezone.com/read/2018/03/19/337/1874852/kpk-hanya-4-ibu-yang-ajarkan-kejujuran-pada-anaknya)

<sup>7</sup> Feni Qoriroh dan Maya Mustika Kartika Sari, "Partisipasi Aktif Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Dalam Upaya Pendidikan Anti Korupsi Di Surabaya," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 03 No. 04 (2016), 6.

libat aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh SPAK).

Data-data yang diperoleh tentang bagaimana perkembangan dan dinamika SPAK di Yogyakarta ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang lebih mengutamakan interpretasi penulisnya dalam mengelola fakta dan peristiwa yang terjadi.<sup>8</sup> Penggalan data dilakukan dengan cara observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh SPAK dan wawancara mendalam dilakukan terhadap anggota SPAK Yogyakarta dan peserta pelatihan yang dilakukan oleh SPAK. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh SPAK Yogyakarta.

### **Pemberdayaan Perempuan Melalui SPAK**

SPAK Yogyakarta (SPAK) merupakan gerakan yang mengkoordinir perempuan-perempuan pegiat Anti Korupsi. Mereka tergabung dalam satu wadah dan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengkampanyekan semangat Anti Korupsi di kalangan masyarakat, khususnya perempuan. Sebagai istri dan sebagai ibu, perempuan merupakan tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Hal ini menjadi perhatian bagi KPK dan AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*). AIPJ adalah salah satu program DFAT untuk penegakan hukum dan keadilan. KPK dan AIPJ percaya, bahwa kekuatan yang dimiliki oleh perempuan Indonesia akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi upaya perlawanan terhadap korupsi khususnya dalam proses pencegahan tindakan korupsi.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1999), 24

<sup>9</sup> Anti-Corruption Cleaning House, "Temu Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi Di Yogyakarta," diakses pada 26 oktober 2017, dari <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya->

Gerakan ini dilahirkan atas sebuah keprihatinan dari hasil *survey* KPK pada tahun 2012–2013 di kota Solo dan Yogyakarta tentang tindakan korupsi. Hasil studi ini menyajikan fakta bahwa ternyata hanya 4% orang tua yang mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya.<sup>10</sup> Bentuk organisasi SPAK berbentuk komunitas, sehingga gerakan SPAK baik di Yogyakarta maupun di daerah-daerah lain tidak memiliki keanggotaan yang terstruktur. Hanya saja pengurus inti berbentuk koordinator seringkali disebut ketua, kemudian dibantu oleh sekretaris dan bendahara yang sifatnya kondisional. Selanjutnya, keanggotaan akan disebut sebagai Agen.

Secara umum program yang ada di dalam organisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Yogyakarta terdiri dari dua kegiatan, *pertama* Training of Trainer (ToT) dan yang *kedua* adalah sosialisasi pendidikan Anti Korupsi. Kegiatan ToT ini dilakukan setiap tahunnya sebagai pelatihan untuk para calon Agen SPAK di seluruh Indonesia. Untuk SPAK Yogyakarta kini sudah melakukan ToT selama 4 kali. Pelaksanaan TOT sebanyak 3 kali dilakukan untuk umum dan 1 kali TOT untuk Polwan dan Jaksa se-Yogyakarta pada tahun 2017. Kegiatan ToT tersebut dilaksanakan selama 3 hari. *Hari pertama* berisi penjelasan tentang delik-delik korupsi. *Hari kedua*, berisi tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat-alat bantu sosialisasi. Sedangkan di *hari ketiga* merupakan simulasi untuk melakukan sosialisasi. Dalam simulasi ini, peserta diberikan satu situasi, misalnya dalam suatu kesempatan reuni terhadap apa yang akan mereka lakukan, jika melihat tentang tindakan korupsi yang ada di sekitarnya. Mereka yang telah mengikuti proses ToT, akan diberikan kebebasan apakah ia akan aktif mengkampanyekan semangat Anti Korupsi di

[perempuan-antikorupsi/spak-yogya/temu-nasional-saya-perempuan-anti-korupsi-di-yogyakarta](https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/spak-yogya/temu-nasional-saya-perempuan-anti-korupsi-di-yogyakarta)

<sup>10</sup> Anti-Corruption Cleaning House, "Temu Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi Di Yogyakarta."

sekitar lingkungannya atau tidak sama sekali. Pengurus inti hanya melakukan *follow-up* kepada alumni peserta ToT, namun tidak ada keharusan untuk alumni menyelenggarakan sebuah acara. Kampanye Anti korupsi memang diharapkan berawal dari lingkup mikro, misalnya di keluarga. Sehingga, sasaran dari gerakan SPAK merupakan hal-hal mikro yang dirasa sangat penting untuk membentengi masyarakat dari perilaku korupsi.

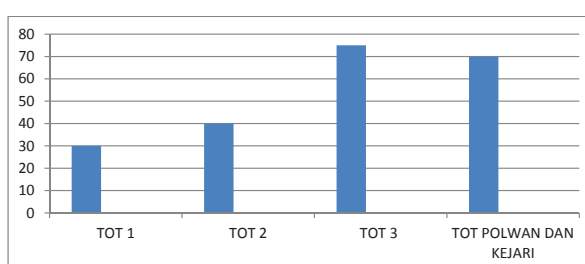
Aktivitas yang paling sering dilakukan oleh anggota SPAK biasanya ialah *training* serta sosialisasi pendidikan anti korupsi. Melalui *talkshow*, seminar, serta kampanye melalui permainan-permainan Anti Korupsi. Sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan gambar-gambar menarik serta video yang berkaitan dengan semangat Anti Korupsi khususnya bagi perempuan. Isi dari pamflet, video, kaos atau bahkan permainan mengandung kata-kata yang secara Psikologis mendorong semangat Anti Korupsi. Misalnya dalam permainan, beberapa permainan yang disediakan oleh SPAK antara lain ialah Semai, Majo, Arisan dan Put-put LK.

Permainan MAJO mengajak kita mengenal berbagai tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya, dengan cara mudah. MAJO terdiri dari papan permainan (Beberan), kartu putih berisi sebuah situasi dan kartu merah berisi satu pertanyaan. Sedangkan dalam permainan arisan terdapat undian pertanyaan sudah ada di dalam toples. Contoh pertanyaan yang biasa diberikan kepada peserta sosialisasi antara lain ialah bagaimana pendapat anda tentang gratifikasi?. Apakah bolos merupakan tindakan koruptif?. Apa perbedaan *money laundry*, suap dan Gratifikasi?. Serta masih banyak pertanyaan lain yang mengarah kepada semangat Anti Korupsi.

Kegiatan sosialisasi pendidikan Anti korupsi melalui permainan merupakan kegiatan yang cukup besar pengaruhnya karena orang

akan lebih memahami permasalahan, apabila menggunakan gambar-gambar yang menarik. Harapannya kegiatan sosialisasi seperti ini lebih sering diadakan dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Keuntungannya, kegiatan ini simpel dan mudah untuk dipahami oleh peserta sosialisasi. Berbeda dengan ToT yang merupakan agenda utama rutin, kegiatan sosialisasi dilakukan hanya satu tahun sekali sebagai metode perekrutan keanggotaan baru SPAK.

Grafik 1. Jumlah Peserta TOT



Sumber : SPAK Yogyakarta, 2017

Grafik 1 tersebut menunjukkan kegiatan TOT yang dilakukan oleh SPAK selalu meningkat jumlah pesertanya dengan kategori peserta yang semakin beraneka ragam. Peserta mencakup masyarakat umum, ibu rumah tangga, mahasiswa dan aparat penegak hukum (Polwan-Kejati).

### Struktur Organisasi SPAK

SPAK tingkat nasional dibentuk pada tahun 21 April 2014 yang bertepatan dengan Hari Kartini oleh KPK bekerja sama dengan AIPJ. SPAK Yogyakarta didirikan tidak lama setelah SPAK secara nasional dibentuk. Menurut keterangan Mila Okvianisa<sup>11</sup> yang merupakan

<sup>11</sup> Mila Okvianisa atau yang akrab dipanggil Oneng ini merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Saat diwawancarai peneliti pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 21.00 di Cafe Basa Basi Sorowajan Bantul beliau menceritakan perjalanannya aktif di SPAK Yogyakarta. Dari awal dampai sekarang, Oneng merupakan pengurus yang bisa dibilang aktif karena ia mengikuti perkembangan SPAK Yogyakarta dari awal dibentuk hingga hari ini.

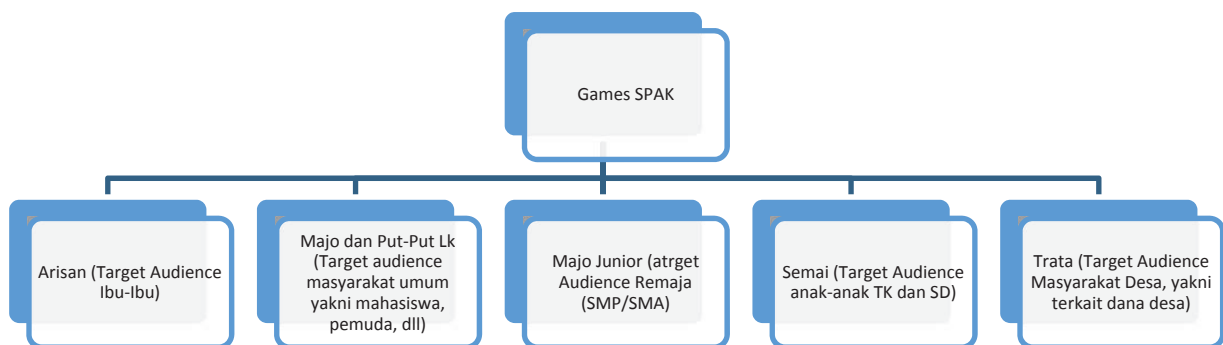
sekretaris, SPAK Yogyakarta didirikan sekitar tanggal 03-05 November 2014. Semangat ini kemudian menjadi pendorong untuk mendirikan beberapa cabang dan melakukan sosialisasi sendiri. Media yang menjadi unggulan SPAK dalam sosialisasi Anti Korupsi yang paling utama ialah *games* kreatif karena memang misi utama SPAK ialah bagaimana melakukan pencegahan *se-masiv* mungkin. Beberapa *games* antara lain ialah Arisan, Majo, Put-put LK, Semai dan yang terbaru, Trata.<sup>12</sup> Selain *games*, SPAK juga melakukan sosialisasi melalui forum dan tatap muka langsung kepada masyarakat, khususnya setiap orang yang memiliki kedekatan dengan agen itu sendiri.

Permainan-permainan yang disebut diatas memiliki target *audience*-nya masing-masing. Dari mulai kalangan umum, remaja, ibu-ibu, siswa-siswa TK dan SD, SMP dan SMA, hingga masyarakat desa. Masyarakat desa memang perlu mendapat sosialisasi tentang semangat Anti Korupsi, apalagi dengan isu dana desa dari pemerintah yang jumlahnya tidak sedikit dan perlu pengawalan penuh dari masyarakat. Permainan terkait dana desa yang disebut Trata

merupakan permainan baru. Harapannya, masyarakat desa bisa mengawal penggunaan dana desa di tempunya masing-masing.

Setelah tanggal 21 April 2014, SPAK Yogyakarta pada bulan November 2014 dibentuk oleh KPK dan AIPJ dengan bantuan pegiat Anti Korupsi yang ada di Yogyakarta yakni GPMK (Gerakan Pemuda Melawan Korupsi). Bersama dengan GPMK, KPK dan AIPJ membentuk kepanitiaan yang akhirnya terbentuk SPAK Yogyakarta, pada waktu itu diikuti oleh 30 peserta. Setelah itu, Pada tahun 2015 diadakan ToT SPAK Yogyakarta yang kedua yang mereka sebut sebagai SPAK ToT 2. Peserta yang mengikuti SPAK ToT 2 sekitar 40 peserta. Pada tahun 2016, SPAK Yogyakarta dengan bantuan KPK dan AIPJ membentuk SPAK Polwan, yang awalnya sasarannya masyarakat umum menjadi diperluas ditambah dengan aparat penegak hukum yang pekerjaannya menjaga ketertiban masyarakat. Tahun 2017, SPAK mengadakan ToT ketiga yang diikuti oleh sekitar 75 peserta. Pada tahun yang sama, dibentuk pula SPAK khusus *difable* yang disebut sebagai SPAK DPO.

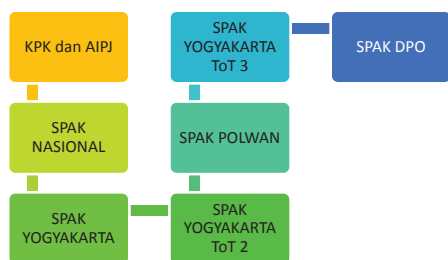
Bagan 1. Permainan dan target sosialisasi SPAK Yogyakarta



Sumber : Wawancara dengan Mila Okviannisa (Pengurus SPAK) pada 24 Februari 2018

<sup>12</sup> Permainan baru ini menurut keterangan Mila merupakan permainan yang targetnya ialah pengawalan terhadap dana desa.

Bagan 2. Proses ToT SPAK Yogyakarta



Sumber : Wawancara dengan Desi Luthfiani (pengurus SPAK) pada 4 Februari 2018

SPAK DPO merupakan SPAK untuk difabilitas yang pertama kali diinisiasi oleh teman-teman Yogyakarta. SPAK DPO bekerja sama dengan SAPDA dan SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difable).<sup>13</sup> Perkembangan terlihat dari beberapa fokus yang dibentuk oleh SPAK itu sendiri, yang awalnya hanya untuk umum, sekarang memiliki dua sasaran fokus yakni Polwan dan SPAK DPO. Meskipun begitu, di Yogyakarta sendiri SPAK untuk masyarakat umum masih ada, tetapi kegiatan lebih banyak dilakukan oleh SPAK Polwan dan SPAK DPO. Salah satu faktornya menurut keterangan narasumber yang peneliti wawancara antara lain

ialah tidak adanya fokus sosialisasi. Sehingga SPAK Yogyakarta yang sifatnya umum lebih sulit untuk mengoordinir massa dibandingkan dengan Polwan dan difabilitas.

Bentuk *output* dari ToT antara lain ialah membentuk agen SPAK yang nantinya melakukan sosialisasi semangat Anti Korupsi. Baik dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama dengan bentuk forum maupun diskusi. Sehingga, untuk keberhasilan sosialisasi memang tidak bisa diukur dengan jumlah kuantitatif. Hampir semua daerah di Yogyakarta memiliki Agen SPAK yang berpotensi untuk melakukan sosialisasi baik mikro maupun makro. Tetapi semenjak dibentuknya tahun 2014, tidak ada reorganisasi kepengurusan dari internal SPAK sendiri. Karena memang SPAK sendiri merupakan komunitas, bukan organisasi, sehingga tidak memiliki acuan yang jelas terkait struktur kepengurusan.

Berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan oleh SPAK tersebut, pemberdayaan yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Pemberdayaan SPAK

Tingkat Pemberdayaan	Langkah Pemberdayaan	Keterangan
Kuasa	Aktor memiliki peran aktif dalam pembangunan terkait kinerjanya, terlibat dalam ekonomi produktif keluarga dan mampu mengendalikan diri dan keluarganya dari tindakan koruptif.	Tahap paling tertinggi pemberdayaan, dimana aktor dapat menguasai dirinya (mengambil keputusan dan dapat memperoleh kesejahteraan), dimana tindakan pencegahan korupsi berada di dalamnya
Partisipasi	Aktor memiliki peran dalam pendidikan dan pencegahan anti koruptif	Aktor dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri
Penyadaran	Aktor menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dengan mencegah tindakan koruptif dapat berdampak secara struktural dan kultural dalam lingkup tatanan birokrasi dan masyarakat	Kesadaran dalam diri aktor bahwa permasalahan yang dihadapi merupakan permasalahan struktural

<sup>13</sup> Kedua lembaga ini merupakan lembaga yang ada di Yogyakarta yang bergerak khusus untuk masyarakat difable.

<b>Tingkat Pemberdayaan</b>	<b>Langkah Pemberdayaan</b>	<b>Keterangan</b>
Akses	Tindakan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh aktor berdampak positif bagi aktor dan lingkungan kerja aktor dan dalam skala luas tidak akan mengurangi dana-dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat luas	Aktor memperoleh manfaat atau akses untuk mendapatkan sumberdaya
Kesejahteraan	Aktor memiliki kesempatan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara (misalnya akses pendidikan/kesehatan) tanpa ada gangguan atau ancaman dari aktor lain dalam sistem	Pemenuhan kebutuhan aktor, bukan hanya sekedar kebutuhan dasar semata

Sumber: Analisa Data Primer, 2017

Pemberdayaan dalam berbagai macam tingkatan: kuasa, partisipasi, kesadaran, akses dan kesejahteraan berjalan seiring sejalan dengan berbagai macam aktivitas SPAK setiap tahun. Aktivitas tersebut merupakan sebuah proses yang harus dijalankan secara terus menerus di semua level masyarakat. Tingkat keberhasilan kegiatan, dalam skala mikro keluarga dapat mendidik anak untuk terhindar dalam kegiatan yang koruptif. Skala makro dapat diukur dari rendahnya indeks korupsi di daerah Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

### **Simpulan**

Organisasi merupakan salah satu fungsi dalam sebuah sistem sosial yang berfungsi untuk menggerakkan ataupun mengendalikan sebuah sistem. Pada sistem yang korup, kendali sistem melalui organisasi yang antikorup merupakan usaha kecil yang tentunya tidak bisa merubah sistem korup menjadi sistem anti korup dalam waktu yang singkat. Kiprah organisasi anti korupsi ini memerlukan waktu panjang untuk bisa melakukan perubahan sosial dalam skala yang massif.

SPAK merupakan salah satu organisasi yang relatif baru dalam proses dan berbagai macam aktivitas untuk memberdayakan masyarakat anti korupsi. Dalam sistem yang korup,

peran dan kiprah SPAK ini merupakan peran kecil atau bahkan tidak punya peran karena berada di luar sistem yang tidak memiliki peran besar dalam perubahan sosial. Dalam konteks ini, peran yang bisa merubah sistem yang korup menjadi sistem yang anti korupsi.

Peran dan aktivitas dalam bentuk pemberdayaan yang berlangsung secara terus menerus bukan hal yang tidak mungkin bisa menyebabkan perubahan sosial. Perubahan sosial bisa dilakukan dengan upaya perempuan secara terus menerus dalam tindakan dirinya, keluarga dan masyarakat untuk mencegah tindakan anti korupsi. Upaya pencegahan tersebut bukan merupakan tindakan yang mudah, mengingat prosesnya sangat lama, tidak bisa dengan cepat diperoleh hasilnya, membutuhkan banyak kreativitas untuk menjadikan kegiatan sebagai hal yang tidak membosankan, membutuhkan banyak tenaga untuk membuat proses bisa kontinu serta membutuhkan banyak finansial sebagai bahan bakar untuk semua proses yang dijalankan.

SPAK sebagai salah satu fungsi yang dijalankan oleh sistem, perlu bekerjasama dengan sistem yang lain (sistem ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan) untuk bisa bergandengan tangan membangun sistem anti korupsi di Indonesia. Kerjasama dengan sistem lain menjadi sebuah keniscayaan untuk merubah sistem yang korup menjadi sistem yang anti korupsi. Tanpa kerjasama ini, SPAK hanya menjadi bagian kecil

dalam sistem anti korupsi yang perannya tentu saja belum sampai pada tahap mewarnai, apalagi melakukan perubahan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed Hussein. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Yogyakarta: LP3ES, 1999.

Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer* terj. Al Gozie Usman. Yogyakarta: LP3ES, 1986.

Azuhri, Muhandis. "Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Budaya Anti Korupsi." *Jurnal Muwazah* Vol. 3, No.2 (2011).

Black, James A. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Qoriroh, Feni dan Maya Mustika Kartika Sari. "Partisipasi Aktivistis Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Dalam Upaya Pendidikan Anti Korupsi Di Surabaya." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* Vol. 03 No. 04 (2016): 6.

Knight, Jack. *Institutions and Social Conflict*. USA: Cambridge University Press, 1992.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Saya Perempuan Anti Korupsi*. Jakarta: KPK, 2010.

Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1999.

Muryanti. *Perempuan Pedesaan: Kajian Sosiologis Pekerja Rumah Tangga (PRT)*. Yogyakarta: Bimasakti Publishing, 2012.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 2007.

Rappaport, Julian, Carolyn Swift, dan Robert Hess, eds. *Studies in empowerment : steps toward understanding and action*. New York : Haworth Press, 1984.

Ritzer, George. *The Wiley-Blackwell Companion to Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Klitgard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Sarjono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: UGM Pers, 2007.

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Bidang. Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Scott, W.Richard. *Institution and Organization: Ideas and Interest*, Standford University: Sage Publication, 2008.

Umami, Fita Khoirul. *Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

#### Sumber Online

Stefanus Osa. "Perempuan dalam Pusaran Korupsi." *Kompas.com*. 27 Februari 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/29/15524491/perempuan.dalam.pusaran.korupsi.?page=1>

Basaria Panjaitan. "KPK: Hanya 4% Ibu yang Ajarkan Kejujuran pada Anaknya," *Okenews*. 26 Oktober 2017. <https://news.okezone.com/read/2018/03/19/337/1874852/kpk-hanya-4-ibu-yang-ajarkan-kejujuran-pada-anaknya>

Anti-Corruption Cleaning House. "Temu Nasional Saya Perempuan Anti Korupsi Di Yogyakarta." Diakses pada 26 oktober 2017, dari <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/saya-perempuan-antikorupsi/spak-yogya/temu-nasional-saya-perempuan-antikorupsi-di-yogyakarta>



## STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ditulis dengan huruf kapital.</li> <li>2) Dicitak tebal (<b>bold</b>).</li> </ol>
2.	Penulis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama penulis dicetak tebal (<b>bold</b>), tidak dengan huruf besar.</li> <li>2) Dilengkapi dengan identitas penulis (nama instansi dan email penulis) Contoh : <b>Inayah Rohmaniyah</b> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rochmaniyah@yahoo.com</li> </ol>
3.	Heading	<p>Penulisan Sub Judul ataupun sub-sub judul tidak menggunakan abjad ataupun angka. Contoh:</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>Pendahuluan</b> <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> Lokasi Geografis (dst).</p>
4.	Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst.</li> <li>2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicetak tebal (<b>bold</b>), tidak dengan huruf besar.</li> <li>3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal (maksimal 250 kata)</li> </ol>
5.	Body Teks	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teks diketik 1,5 spasi, 5.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4.</li> <li>2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi.</li> <li>3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.</li> </ol>
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) <b>Tidak menggunakan <i>Ibid</i>, <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</b></li> <li>5) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>6) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>7) Diketik 1 spasi.</li> </ol>

7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li><li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau <b>مصدر</b> (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li><li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li><li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li></ol>
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ʿ	ظ = ḏ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ʿ	ه = h	و = w	ن = n

Pendek    a =               i =               u =   

Panjang    ā =               ū =               ī =   

Diftong    ay =               aw =   

Panjang dengan *tashdid* : iyy =    ; uww =   

*Ta' marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma'idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyuhannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi'i bukan al-Syāfi'i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā'id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *'urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur'an bukan Al-Qur'ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā 'Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7